

Informasi Pasar Kerja Bagi Pekerja Lulusan SMK untuk Menunjang Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

14 Oktober 2021





Sekarang adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki Sistem Informasi Pasar Kerja

Pandemi
Covid-19

Dua kejadian
penting terkait
ketenagakerjaan di
tahun 2020:

Undang-
Undang No.
11/2020
tentang Cipta
Kerja



Tujuan

Mengeksplorasi kesiapan dan tantangan dalam menggunakan IPK untuk mendukung JKP

Kerangka Analisis

Analisis ekonomi politik dipakai untuk melihat struktur, institusi, & aktor ketenagakerjaan dalam penggunaan IPK

Lingkup Studi

Lulusan SMK, perusahaan besar, 3 wilayah: Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung



Metodologi: Kualitatif dan Kuantitatif



Studi Literatur

- Kebijakan pasar kerja aktif dan pasif
- Peran internet
- Peran keberantaraan



Pengamatan

- Memantau
 - Karirhub-Sisnaker
 - Job Platform pemda & swasta
- Pengamatan partisipan



Wawancara mendalam

- Pemda, pemprov
- DUDI
- BKK dan Forum BKK
- Platform swasta
- Serikat buruh



Survei online

- Menyasar 260 responden
- Angkatan kerja



Survei telepon

- Menyasar 1.016 responden
- Pekerja, pencari kerja, pekerja ter-PHK di Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kota Bandung



Pengolahan data makro

- Sakernas 2016-2020



JKP merupakan intervensi yang lengkap

Kebijakan Pasar Kerja Aktif

- Martin (2014): negara-negara OECD menerapkan strategi aktivasi dalam pasar kerja
- Romero & Kuddo (2019): ALMP mencakup tujuan ekonomi dan sosial
- Yeyati et al (2019): ALMP adalah instrumen dalam menghadapi berbagai perubahan

Kebijakan Pasar Kerja Pasif

- Park (1999): PLMP di-desain untuk memberi penghidupan bagi yang ter-PHK
- JKP sangat penting untuk menghadapi RI 4.0 (ILO, 2020)

Kombinasi kebijakan pasar kerja aktif dan pasif

- WB (2020): ALMP bukan panacea terhadap kegagalan pasar
- Pignatti & van Belle (2018): interaksi ALMP dan PLMP sangat penting

Internet bermanfaat bagi pencari dan pemberi kerja

Biaya dalam mencari informasi

- Autor (2009): Informasi mengenai pencaker dan lowongan adalah *public good* sehingga *under supply*

Internet bisa menurunkan biaya mencari informasi

- Kuhn (2014)
- Nakamura et al (2009)
- Stevenson (2009)

Namun, pasar kerja dicirikan juga oleh informasi yang asimetrik

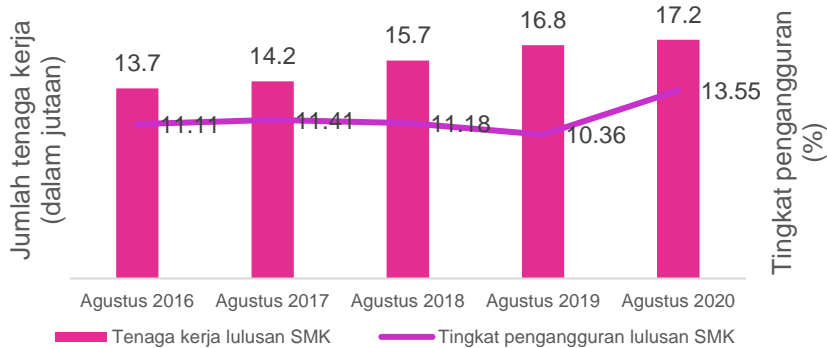
- Autor (2001), Manning (2010): peran internet minimal jika ada fenomena *adverse selection*



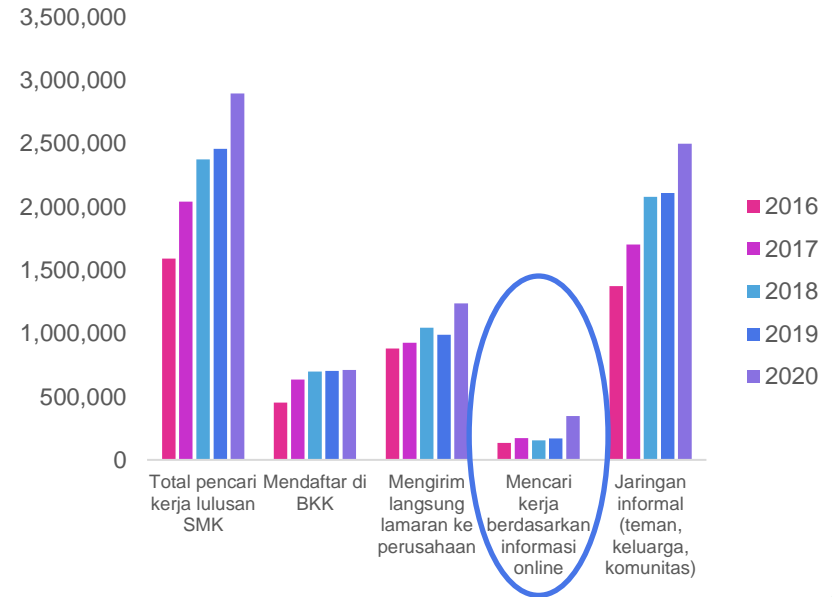
Seperti apa kesiapan dan tantangan yang dihadapi oleh pencari kerja, pemberi kerja, dan keberantaraan kerja dalam mendukung IPK untuk JKP?

Profil lulusan SMK (Sakernas)

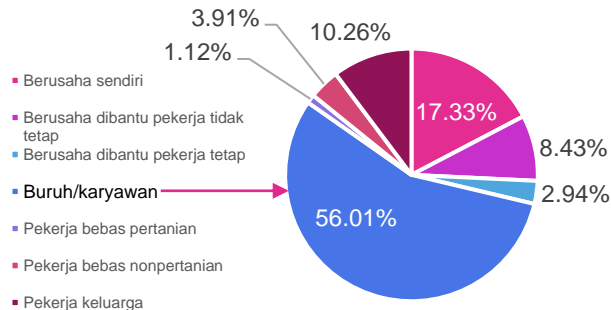
- Ada peningkatan dalam penciptaan lapangan kerja, namun terhapus oleh pandemi



- Ada peningkatan dalam penggunaan internet dalam mencari pekerjaan

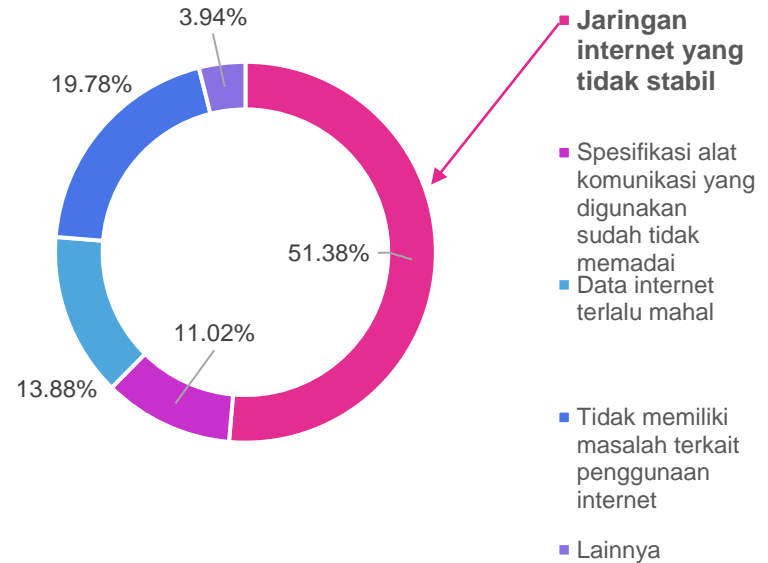
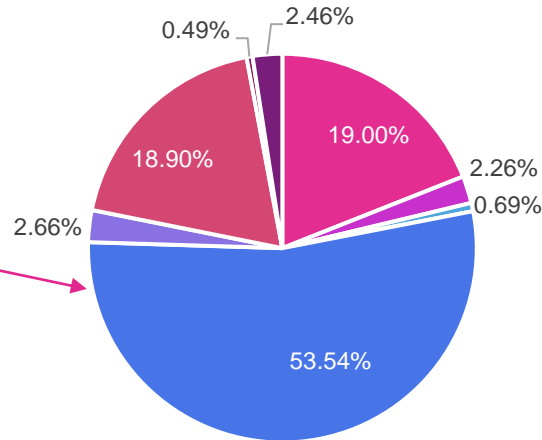


- Lulusan SMK masih didominasi oleh buruh/karyawan



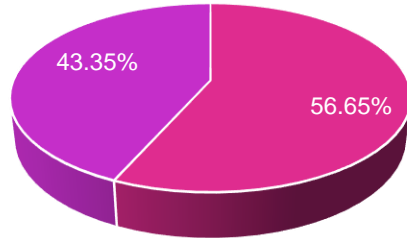
Pencaker lulusan SMK secara umum sudah terbiasa dengan internet, tetapi penggunaannya masih terbatas

- Membaca informasi dan berita
- Kegiatan terkait pembelajaran
- Membuka email
- **Media sosial dan aplikasi komunikasi**
- Aktivitas transaksi daring
- Hiburan
- Kegiatan terkait keuangan/transaksi bank
- Mencari informasi tentang barang dan jasa



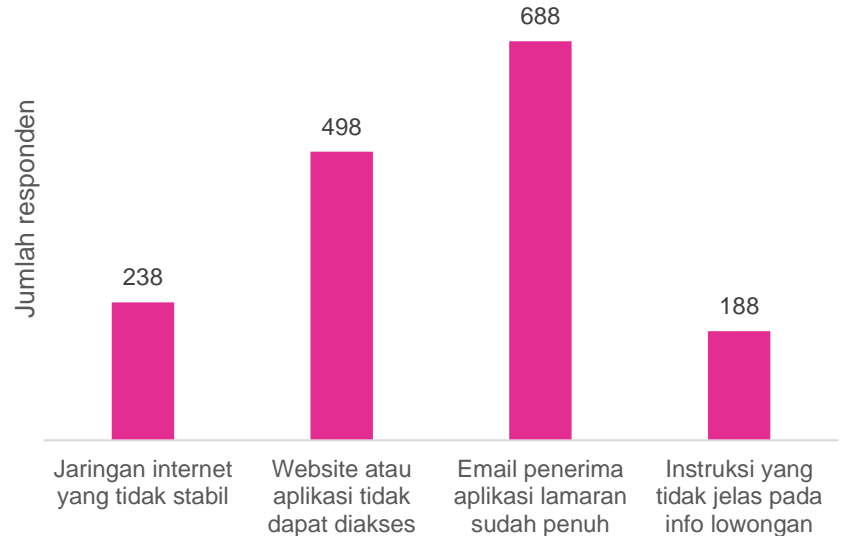
Pencaker lulusan SMK secara umum sudah memanfaatkan internet dalam mengirim aplikasi. Namun ...

Literasi digital masih rendah



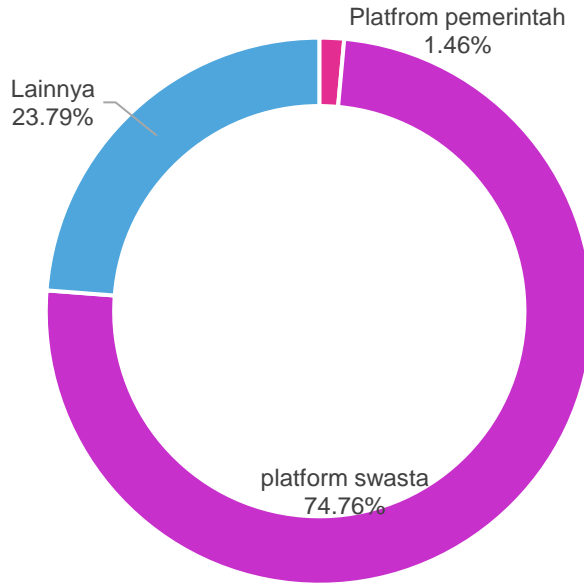
- Telah mengirimkan dokumen pribadi ke info lowongan palsu
- Tidak mengirimkan dokumen pribadi ke info lowongan palsu

Permasalahan dalam melamar kerja secara daring



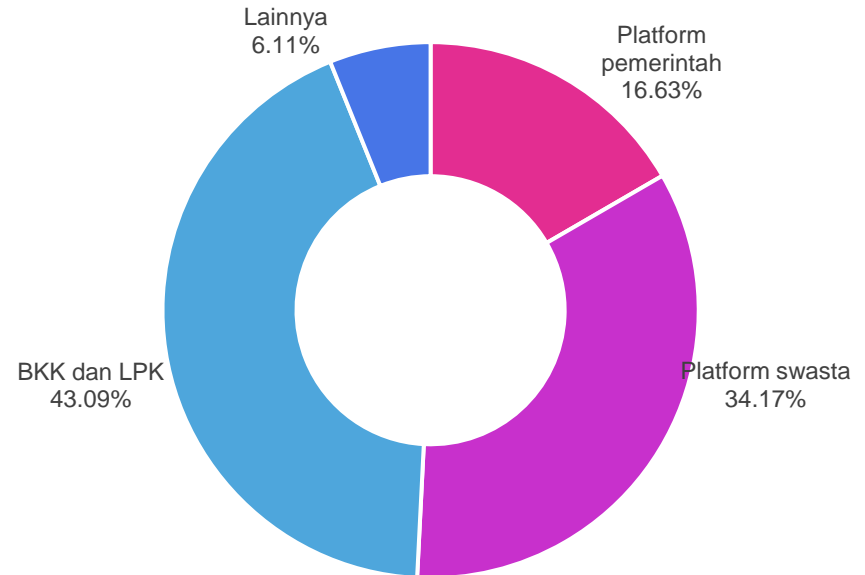
Pencaker lulusan SMK cenderung memilih platform milik pemerintah

■ Survei online



n=260, mayoritas S1/D4

■ Survei Telepon



n=1016, semua SMK

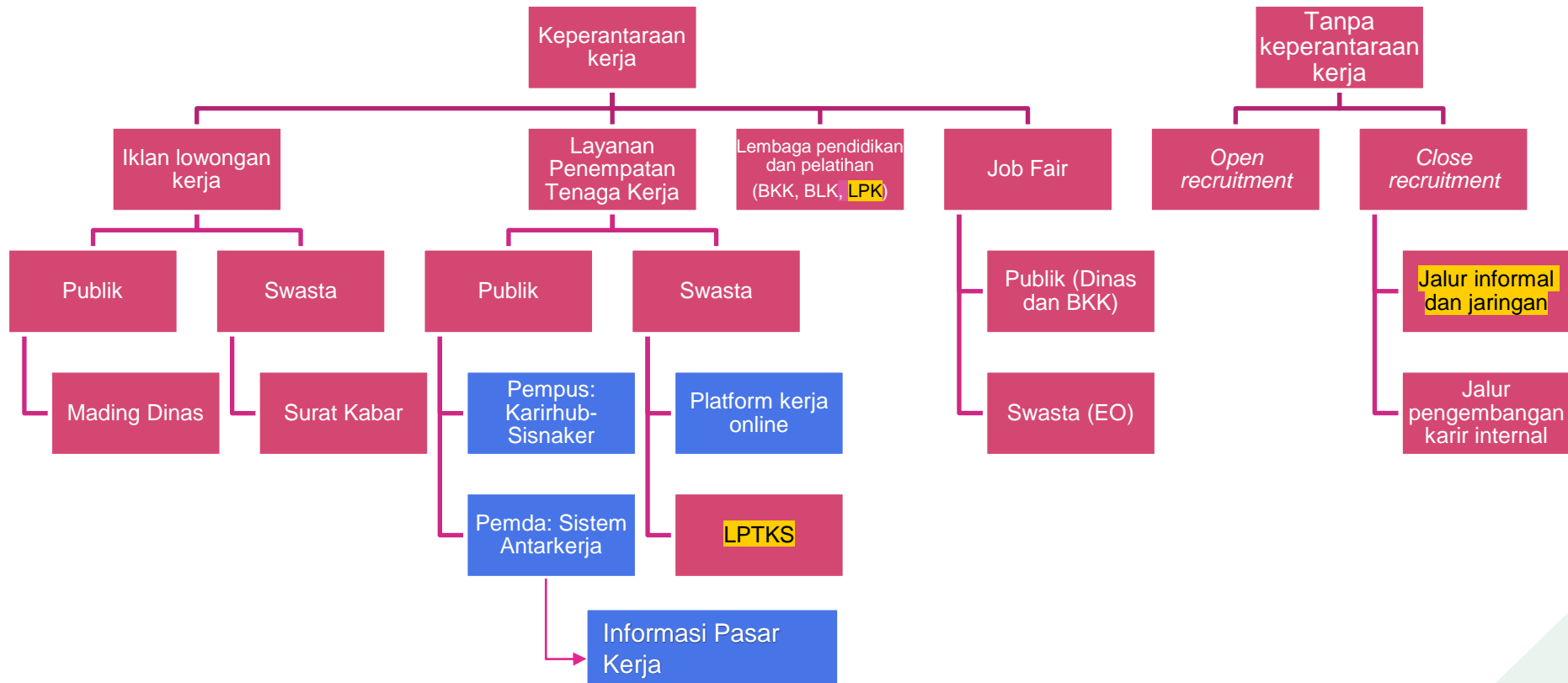
Proses rekrutmen operator masih mahal dan manual



“Rata-rata kelemahan pencaker pada nilai matematika, dan IPA sehingga gugur dalam seleksi admin. Lanjut ke psikotest, gugur 75%. Tes fisik gugur sekitar 55%”

(wawancara dengan Forum Komunikasi BKK Jawa Barat, 16 Juni 2021)

Preferensi perusahaan besar dalam rekrutmen operator belum beririsan dengan IPK



Beberapa Catatan dalam Institusi Keperantaraan Kerja

Permenaker 39/2016 tentang Penempatan TK

- Disnaker tidak lagi ikut serta dalam proses seleksi pekerja
- Belum ada proses verifikasi dan validasi lowongan

Percaloan

- Oknum yang mengatasnamakan:
 - masyarakat setempat
 - LSM
 - pejabat
 - HRD

Permenaker 6/2020 tentang pemagangan

- Pengawasan belum dijabarkan secara jelas
- Jam kerja maksimum
- Apakah hanya untuk pekerja baru lulus?

Rekrutmen masih manual & mahal

- Mobilisasi untuk ikut seleksi
- Kontak fisik menyuburkan percaloan

Mindset bekerja di perusahaan besar

- Gengsi yang tinggi
- Bersedia membayar

Preferensi DUDI

- DUDI lebih suka menggunakan LPTKS, LPK, jalur informal
- Keperantaraan ini yang menangani fenomena *adverse selection* dan percaloan

Keperantaraan kerja pemerintah pusat dan daerah masih punya banyak PR

Karirhub-Sisnaker sebagai IPK (nasional)

- Sisnaker merupakan terobosan dalam pelayanan ketenagakerjaan:
 - 12 layanan
 - *Single Sign On*
 - terintegrasi dengan OSS & Dukcapil
 - pendekatannya WLKP
 - gratis
- Masih banyak PR untuk perbaikan Karirhub-Sisnaker

Sistem Antarkerja

- Konsep lama yang perlu diperbarui dan digitalisasi
- Banyak laporan yang harus disetor ke Disnaker dan berjenjang sampai ke pusat
- Isu *data sharing* secara vertikal
- Peran sentral ada pada pengantar kerja
- Belum terlihat kaitan antara Sistem Antarkerja dan Karirhub-Sisnaker
 - karena masih ada data manual
 - Tingkat lokal juga memiliki IPK masing-masing

Kesimpulan

IPK dapat memperbaiki proses rekrutmen

- Pencaker lulusan SMK siap menggunakan IPK, namun dengan catatan
- Perusahaan belum menggunakan IPK untuk merekrut operator
- Meski demikian penggunaan IPK tetap direkomendasikan
 - Meminimalkan kontak fisik (*new normal*)
 - Mengurangi percaloan: sudah ada sedikit bukti yang mendukung hal ini di Karawang
 - Mengurangi biaya pencarian kerja
 - Meningkatkan keterpaparan pencaker terhadap UMK
 - Namun diperlukan mekanisme untuk verifikasi dan validasi lowongan palsu

Rekomendasi kebijakan

**Pemerintah pusat perlu menciptakan IPK yang inklusif:
*the more the merrier***

- **Aktor-aktor di sisi *demand* untuk meningkatkan lowongan**

- Usaha Mikro dan Kecil (layanan IPK gratis)
- LPTKS dan LPK
- Perusahaan besar (*pilot project*)

- **Aktor-aktor di sisi *supply* untuk meningkatkan kredibilitas**

- Pengenalan IPK saat bersekolah dan pada BKK
- Fasilitas Wi-Fi dan literasi digital pada Disnaker
- Peserta job fair, pendaftar BLK, LPK, LPTKS

Rekomendasi kebijakan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersinergi untuk menerapkan JKP secara optimal

- **Perbaiki Karirhub-Sisnaker**

- Optimalisasi media sosial
- Karirhub-Sisnaker sebaiknya menjadi agregator platform pemda dan *job* platform swasta
- Perlu menyamakan *interface* untuk kemudahan agregasi

- **Perbaiki Sistem Antarkerja**

- Digitisasi dan digitalisasi Sistem Antarkerja
- Menata ulang Indikator Kinerja Utama
- Peningkatan kapasitas dan sistem insentif bagi pengantar kerja

Karirhub-Sisnaker sebagai IPK
agregator sebaiknya memprioritaskan
UMK dan lulusan SMK



“

THANK YOU



www.smeru.or.id



smeru@smeru.or.id



[@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)



The SMERU Research Institute



[@smeru.institute](https://www.instagram.com/smeru.institute) [@riseprogramme.id](https://www.instagram.com/riseprogramme.id)

